

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PABU), juga merupakan adaptasi dari *GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)*. Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Audit atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Audit ini merupakan jasa *assurance* yang paling umum diberikan oleh KAP.

Lalu terdapat 5 jenis auditor yang pertama Kantor Akuntan Publik, bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lainyang cukup besar, dan banyak perusahaan serta

organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal. Lalu yang kedua, Auditor Internal Pemerintah, adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 auditor di seluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

Kemudian yang ketiga adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Yang keempat Auditor Pajak, adalah auditor yang melaksanakan pemeriksaan SPT wajib pajak apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Masalah perpajakan mungkin

melibatkan pajak penghasilan pribadi, pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak korporasi perwalian, dsb. Seorang auditor yang terlibat dalam salah satu bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang cukup luas untuk melakukan audit yang efektif. Kemudian yang terakhir Audit Internal, adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Elder, dkk (2011).

Auditor yang memiliki kredibilitas, selain bisa mendeteksi adanya salah saji dalam laporan keuangan, juga dapat memberikan saran ataupun nasihat kepada klien demi kelangsungan perusahaannya. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, sehingga dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Manajemen perusahaan memerlukan auditor yang berkualitas dan juga mampu mengikuti pertumbuhan perusahaan yang cepat. Apabila hal ini tidak dapat terpenuhi maka perusahaan akan mengganti auditor yang ada saat ini.

Pemerintah di Indonesia telah mengatur tentang kewajiban untuk merotasi auditor yang digunakan oleh perusahaan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003) tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan

oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pergantian KAP ini, terutama yang dilakukan tanpa pertimbangan yang wajar dapat dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas dari audit itu sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi pergantian KAP diantara perusahaan maka beberapa negara menerapkan peraturan terkait dengan pergantian KAP. Fenomena kasus Enron yang terjadi di tahun 2001 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen, menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya yang menyebabkan kegagalan tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa hal ini disebabkan akibat adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien yang memungkinkan menciptakan suatu resiko *excessive familiarity* (berlebihnya keakraban) yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Sebaliknya dari sudut pandang perusahaan yang diaudit,

hubungan yang berkelanjutan dengan suatu KAP dapat membantu meringankan pekerjaan auditor dalam perencanaan dan praktik akuntansi dan keuangan (Prastiwi dan Wilsya, 2009). Untuk skandal Enron setidaknya telah mendorong para regulator di Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes Oxley Act (SOX). Satu hal yang diatur dalam SOX adalah mengenai jasa audit.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai pergantian auditor maka diketahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP diantaranya Opini audit, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, dan manipulasi *income*, perubahan manajemen, ukuran KAP, dan *audit fee*. Penelitian Nasser, *et al.* (2005) dalam (Nuryanti, 2012) menganalisis pengaruh faktor-faktor pergantian auditor secara *voluntary* dalam lingkungan audit di Malaysia untuk periode 1990-2000. Variabel dependen yang digunakan adalah *auditor switching* dan variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan klien, masalah keuangan perusahaan klien, dan ukuran KAP. Hasil penelitiannya adalah variabel independen tersebut berpengaruh terhadap pergantian auditor. Kemudian penelitian oleh (Button dan Roberts, 1967; Bedingfield dan Loeb, 1974; Beattie dan Feamley, 1995; Woo dan Koh, 2001, Ismail *et al.*, 2008) dalam Wijaya (2013) mengenai ketidakpuasan atas *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor pergantian auditor, *leverage* dan oportunitas manipulasi *income* (Woo dan Koh, 2001) dalam Wijaya (2013), *qualified opinion* (Chow dan Rice, 1982; Craswell, 1998; Hudaib dan

Cooke, 2005) dalam Wijaya (2013), *financial distress* (Schwartz dan Menon, 1985; Nasser *et al.*, 2006) dalam Wijaya (2013), pertumbuhan perusahaan (Woo dan Koh, 200; Nasser *et al.*, 2006) dalam Wijaya (2013), resiko finansial perusahaan (Nasser *at al.*, 2006) dalam Wijaya (2013), ukuran Kantor Akuntan Publik (Carpenter dan Strawser, 1971) dalam Wijaya (2013), dan *Initial Public Offering* (Menon dan Williams, 1992) dalam Wijaya (2013). Pada penelitian yang akan dilakukan sekarang variabel independen yang digunakan adalah opini audit, pertumbuhan perusahaan, *financial distress*. Penelitian ini dilakukan untuk menguji ulang apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atas variabel dependen yaitu pergantian KAP.

Masalah opini audit juga dapat menjadi pemicu pergantian KAP. Kondisi ini muncul saat perusahaan klien atau akuntan publik tidak setuju dengan opini audit sebelumnya atau yang akan datang. Opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk mengganti auditornya. Hudaib dan Cooke (2005) dalam Nuryanti (2012) menemukan bahwa pihak *auditee* memiliki kecenderungan untuk mengganti auditornya setelah menerima opini audit *qualified*. Apabila auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (opini yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan) maka perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Pergantian KAP juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan klien (Nagy, 2005 dalam Nuryanti (2012).

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, maka operasional perusahaan semakin kompleks, juga terjadi pemisahan antara manajemen dan pemilik mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan akan independensi auditor meningkat untuk mengurangi biaya agensi yang disebabkan pertumbuhan perusahaan tersebut. (Watss dan Zimmerman, dikutip oleh Nasser,*et al.*, 2005 dalam Nuryanti(2012). Perusahaan akan mengganti auditor dengan KAP lain jika perusahaan menganggap auditor yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan perusahaan.

Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini memang tidak dapat diramalkan secara pasti. Perusahaan harus melakukan berbagai analisis terkait kebangkrutan perusahaan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan, agar kebangkrutan tersebut tidak terjadi pada perusahaan. Hal ini juga berpengaruh dengan pergantian auditor atau KAP.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan penemuan yang masih beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian KAP. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada masalah mengenai opini audit, pertumbuhan perusahaan, *financial distress* berpengaruh pada pergantian KAP

pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Penelitian ini mengambil populasi perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur mengalami kegiatan operasional yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang lain dan juga tingkat kapitalisasi pada perusahaan manufaktur lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain lalu banyak perusahaan yang listing laporan keuangannya, dan juga jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar (Perusahaan Manufaktur, 2012). Hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pergantian KAP di luar peraturan pemerintah, dan melihat pengaruh dari opini audit, pertumbuhan perusahaan, *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji ulang terhadap konsistensi hasil dengan penelitian sebelumnya pada periode dan kondisi pasar modal yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit sebelumnya mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah *financial distress* mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh opini audit sebelumnya terhadap pergantian KAP.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian KAP.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh *financial distress* terhadap pergantian KAP.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah temuan bagi penelitian mendatang dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a Dapat menjadi masukan bagi perusahaan klien untuk pertimbangan dalam melakukan perikatan dan pergantian KAP.
- b Memberikan masukan bagi para regulator untuk pengaturan dalam hal audit.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, dan model penelitian.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, indentifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisa data, dan prosedur pengujian hipotesis.

Bab 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan penelitian.

Bab 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan dari seluruh penelitian, keterbatasan penulisan dan saran penelitian yang dapat diberikan dalam penelitian mendatang.